



Nilai Budaya Masjid Jami' Sungai Lumpur Kelurahan II Ulu Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah

Maya Susanti, Muhamad Idris, Aan Suriadi

Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah

Ruli Annisa, Muhamad Idris, Kabib Sholeh

Perbedaan Model Pembelajaran *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) dengan Model Pembelajaran *Jigsaw* Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 Mesuji

Taufik Sidiki Al-Haq, Nur Ahyani, Ida Suryani

Pengaruh Pemanfaatan Media *Youtube* Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah di SMK PGRI 2 Palembang

Riska Anggraini, Nur Ahyani, Ida Suryani

Pengaruh Metode Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah di Kelas XI IPA SMA Shailendra Palembang

Christina Leovita Saragih, Nur Ahyani, Aan Suriadi

Pengembangan Media Pembelajaran Digital Bukti-bukti Bangunan Masjid Kuno di Palembang Berbasis Android

Varokah Widiyanti, Eva Dina Chairunisa, Ahmad Zamhari

Hubungan Jawa-Melayu Dalam Dunia Arsitektur Melayu Sumatera Selatan

Reyvaldi Uyun, Muhamad Idris, Ahmad Zamhari

Kondisi Politik Orde Baru di Gorontalo Tahun 1968-1998

Ferrari Yuliawati S, Suryo Ediyono

Nilai-nilai Sejarah dan Budaya Ikonografi Megalith di Lahat Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Nasional

Jainal Arifin, Sukardi, Dina Sri Nindiati

Minat Siswa Terhadap Sejarah dan Budaya Palembang di SMA Negeri 15 Palembang

Febbi Astuti, Muhamad Idris, Kabib Sholeh

Kalpataru

**JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH**

Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia
Palembang



Kalpataru

Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah
Volume 7, Nomor 1, Juli 2021

Chief Editor

Drs. Sukardi, M.Pd.

Editor

Dr. Muhamad Idris, M.Pd.
Eva Dina Chairunisa, M.Pd.
Jeki Sepriady, S.Pd.

Reviewer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dr. Tahrun, M.Pd. | (Universitas PGRI Palembang) |
| Drs. Supriyanto, M.Hum. | (Universitas Sriwijaya Palembang) |
| Dra. Retno Purwati, M.Hum. | (Balai Arkeologi Sumatera Selatan) |
| Dr. Nor Huda Ali, M.Ag., M.A. | (Masyarakat Sejarawan Indonesia Sumsel) |
| Dr. Budi Agung Sudarman, S.S., M.Pd. | (Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan) |
| Dr. Purmansyah, M.A. | (Universitas Muhammadiyah Palembang) |

Alamat Redaksi

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang
Telp. 0711-510043
Email: jumalkalpatarusejarah@gmail.com
Website: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa>

Kalpataru

JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARAN SEJARAH

Terbit dua kali setahun pada
Juli dan Desember

Diterbitkan oleh:
Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan IPS
Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang

Gambar Cover:
Pohon Kalpataru
Candi Prambanan



Koleksi: Muhamad Idris

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| Nilai Budaya Masjid Jami' Sungai Lumpur Kelurahan Il Ulu Palembang Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah <i>Maya Susanti, Muhamad Idris, Aan Suriadi</i> | 1-9 |
| Analisis Konsep Gender Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah <i>Ruli Annisa, Muhamad Idris, Kabib Sholeh</i> | 10-18 |
| Perbedaan Model Pembelajaran <i>Student Teams Achievement Divisions</i> (STAD) dengan Model Pembelajaran <i>Jigsaw</i> Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 Mesuji <i>Taufik Sidiki Al-Haq, Nur Ahyani, Ida Suryani</i> | 19-27 |
| Pengaruh Pemanfaatan Media <i>Youtube</i> Terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah di SMK PGRI 2 Palembang <i>Riska Angraini, Nur Ahyani, Ida Suryani</i> | 28-36 |
| Pengaruh Metode Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah di Kelas XI IPA SMA Shailendra Palembang <i>Christina Leovita Saragih, Nur Ahyani, Aan Suriadi</i> | 37-42 |
| Pengembangan Media Pembelajaran Digital Bukti-bukti Bangunan Masjid Kuno di Palembang Berbasis Android <i>Varokah Widiyanti, Eva Dina Chairunisa, Ahmad Zamhari</i> | 43-51 |
| Hubungan Jawa-Melayu Dalam Dunia Arsitektur Melayu Sumatera Selatan <i>Reyvaldi Uyun, Muhamad Idris, Ahmad Zamhari</i> | 52-60 |
| Kondisi Politik Orde Baru di Gorontalo Tahun 1968-1998 <i>Ferrari Yuliawati S, Suryo Ediyono</i> | 61-67 |
| Nilai-nilai Sejarah dan Budaya Ikonografi Megalith di Lahat Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Nasional <i>Jainal Arifin, Sukardi, Dina Sri Nindiati</i> | 68-76 |
| Minat Siswa Terhadap Sejarah dan Budaya Palembang di SMA Negeri 15 Palembang <i>Febbi Astuti, Muhamad Idris, Kabib Sholeh</i> | 77-82 |

KONDISI POLITIK ORDE BARU DI GORONTALO TAHUN 1968-1998

Ferrari Yuliawati S

Universitas Sebelas Maret
Email: ferrariyuliaws@gmail.com

Suryo Ediyono

Universitas Sebelas Maret
Email: ediyonosuryo@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam suatu negara pentingnya peranan pemerintah untuk membangun atau mengatur jalannya pemerintahan dari segala bidang yang lain dan tidak bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pada hal ini sama yang terjadi bahwasannya peran politik bukan hanya sekedar peran yang dikesampingkan melainkan satu di antaranya saling berkesinambungan. Presiden yang dikenal dengan sikap tegas dan otoriternya sudah bisa menggambarkan pada rezim yang dinamakan Orde Baru. Pada rezim inilah yang mampu bertahan sampai kurang lebih 30 tahun lamanya. Mencatat sejarah baru dengan kepemimpinan yang lama dari biasanya. Perlu diketahui pada rezim ini pahit dan manis sudah ditelan mentah-mentah rakyat Indonesia khususnya di Gorontalo. Perubahan yang diharapkan oleh masyarakat Gorontalo sangat dirasakan entah dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Penelitian ini dilakukan disalah satu provinsi yang ada di Indonesia, khususnya di pulau Sulawesi bagian Utara yang berkembang menjadi provinsi sendiri. Untuk memperoleh data yang akurat tulisan ini dibantu dengan beberapa kajian literatur yang lebih spesifikasi yang berkesinambungan dengan judul yang diangkat dan narasumber yang hidup pada masanya pada waktu itu. Penelitian ini juga didukung menggunakan penulisan karya ilmiah metodologi sejarah yang di dalamnya terdapat heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tujuannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman atau informasi kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat Gorontalo yang belum hidup pada zamannya sehingga dari tulisan ini dapat membuka wawasan, serta pengetahuan sejarah. Pada dasarnya tidak semua masyarakat Gorontalo mengetahui cerita atau alur kondisi politik pada masa itu.

Kata Kunci: Politik, Orde Baru, Gorontalo.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Orde Baru setelah akhir tahun 1960-an masih banyak menjadi masalah yang krusial. Meskipun demikian sudah jelas bahwa keadaan rakyat pribumi pada tahun 1970-an dan 1980-an lebih baik daripada selama masa demokrasi terpimpin dan penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1971 ada sekitar 12,931 jiwa tahun 1974 sekitar 6.221 jiwa dan 1980 sekitar 147,3 jiwa. Dengan demikian kemajuannya adalah dramatis tetapi pelayanan medis tidak merata sehingga masih jauh dari kata memuaskan. Produksi pangan di Indonesia meningkat secara mencolok karena tersedianya bibit yang bertambah baik dan melimpahnya persediaan pupuk. Pandangan yang pesimistis dari banyaknya ilmuwan bahwa Indonesia pasti

menghadapi bencana pangan berubah menjadi optimis.

Pada pemerintahan Orde Baru yang berlangsung lama, memang pada pemerintahan ini banyak program yang dibuat dan janji-janji untuk masyarakat dan tidak seburuk juga dengan penjajahan bangsa asing yang sudah pernah mencatat sejarah panjang bangsa Indonesia mengenai masa suram yang dialami rakyat Indonesia pada masa itu tetapi tidak sedikit pula banyak masyarakat Indonesia yang mengeluh pada masa pemerintahan ini.

Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan demokrasi, ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, kebudayaan, pandangan hidup, dan tujuan yang ingin dicapainya. Demokrasi Indonesia adalah

demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila yang tertuang dalam sila keempat mencerminkan bahwa Pancasila sepakat kalau sumber utama dari semua kewenangan dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Dalam proses demokrasi di negara ini pengaruh mahasiswa tidak dapat di pungkiri kehadirannya, mahasiswa dalam kaitanya dalam penerapan demokrasi menjadi posisi penentu. Histori dari perjuangan mahasiswa memberikan predikat prestisius bagi mahasiswa, antara lain sebagai *iron stock*, sebagai *guardian value*, dan sebagai *agen of change*. Gelar tersebut memberikan tanggung jawab moral bagi setiap pribadi yang masuk dalam perguruan tinggi yang secara administratif menjadi mahasiswa pada umumnya, tanggung jawab kepada masyarakat untuk mampu melihat apa yang terjadi pada masyarakat dan mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam setiap masalah yang terjadi, serta menjadi penyambung lidah dari masyarakat awam kepada pemerintah. Bahkan bertanggung jawab kepada bangsa dan negara untuk melanjutkan proses regenerasi kepemimpinan dalam pemerintahan kelak (*iron stock*), karena dari mahasiswalah muncul kader-kader bangsa yang dipersiapkan secara mental dan intelektual yang lebih dari masyarakat pada umumnya.

Di masa awal pemerintahannya, Orde Baru melakukan langkah fundamental terkait penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara disegala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional terkait politik, hukum dan sosial. Dibidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prioritas, di antaranya: (1) Pengendalian inflasi; (2) Pencukupan kebutuhan pangan; (3) Rehabilitasi prasarana ekonomi; (4) Peningkatan ekspor; dan (5) Pencukupan kebutuhan sandang (Mayrudin, 2018:73).

Ada lima skala yang diprioritaskan pada pemerintahan ini, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan cara yang disusun pada rancangan pembangunan lima tahunan yang biasa dikenal dengan

Repelita serta menarik simpati masyarakat untuk lebih mempunyai banyak peluang dan mendoktrin lebih banyak walaupun memang rancangan yang dibangun tersebut menjadi realita dan masyarakat dapat merasakan hal tersebut.

Proses dalam mewujudkan stabilitas politik, rezim Orde Baru tidak hanya berhenti pada tataran penghisapan kekuatan-kekuatan partai ke dalam tubuh pemerintah, yaitu dengan munculnya 3 partai, yakni Golkar, PDI, PPP. Akan tetapi, tindakan penyeragaman asas dengan menggunakan Pancasila menjadi pilihan selanjutnya bagi Presiden Suharto dan para petinggi Orde Baru. Maka gagasan penyeragaman asas partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial-keagamaan dilaksanakan. Gagasan penyeragaman asas yang pada mulanya terbatas pada partai-partai politik, kemudian berkembang atau mengenal pada organisasi-organisasi social budaya dan keagamaan lainnya, bahkan pada area pelajar dan mahasiswa (Sifavian, dkk., 2013:17).

Pada masa Orde Baru ada beragam sektor kehidupan, bangunan pemerintahan mempunyai program yang cukup banyak pertanian dan perkebunan dikembangkan, seni budaya daerah mendapat pembinaan sarana dan prasarana perhubungan dibangun dan dipacu. Dilihat dari beberapa prestasi Prasamya Purnakarya Nugraha maka Kabupaten Gorontalo pada tahun 1974 sudah meraih keberhasilan sedangkan Kotamadya Gorontalo berhasil memenangkan lomba Insus tingkat Nasional (Joni Apriyanto, 2012:127).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini yakni menggunakan penulisan metodologi sejarah yang memuat 4 elemen yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Seperangkat teori dan konsep psikoanalisis Freud, Jung, atau Neo-Freudin, sejarawan mulai mengumpulkan keterangan. Memori merupakan sumber yang penting, namun dalam hal kelangkaan memori, wawancara menjadi sarana yang penting dalam mengisi kesenjangan antara teori dan data sejarah (Kuntowijoyo, 2003:33).

Heuristik (pengumpulan data), data-data yang dikumpulkan antara lain dari kajian literatur yang mendukung dengan judul tersebut adapun dengan sumber pustaka yang diperoleh dari buku-buku sejarah di perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo yang sangat membantu untuk penulisan karya ilmiah ini dan memperbanyak kajian literatur maupun pustaka. Selain itu juga penulis mengambil beberapa literatur tidak hanya dari perpustakaan tetapi penulis mengakses buku-buku digital yang sudah tersedia diinternet. Selain itu juga beberapa dari wawancara bersama narasumber yang pernah mengalami. Pengumpulan sumber yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan hasil tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dan hasil wawancara pada salah satu masyarakat asli Gorontalo yang terlibat langsung atau merasakan kepemimpinan Soeharto atau masa Orde Baru. Ada beberapa orang yang sudah meminta keterangan pada masa Orde Baru di antaranya. Selanjutnya tahap kritik Sumber kemudian dikritik dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain dengan mempertimbangkan aspek validitas data, misalnya buku karangan Asvi Marwan Adam berjudul *Seabad Kontroversi Sejarah* yang menceritakan bahwasannya pemerintahan Soeharto ini sebagai kudeta merangkak dalam satu dekade dan dibandingkan oleh penulis dengan buku karangan Eros Djarot dkk. berjudul *Siapaakah Sebenarnya Soeharto Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G 30 S/PKI* yang lebih memperlihatkan fakta melalui kesaksian pelaku sejarah menyangkut era 1965 disaat Soeharto melakukan strategi politiknya. Kemudian ditafsirkan melalui interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah. Fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah konstruksi suatu peristiwa yang utuh. Pada tahap ini peran teori dan metode pendekatan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis sekaligus menjelaskan peristiwa. Langkah terakhir adalah historiografi, yang memuat penulisan sejarah berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah 5 w + 1 H: *what, why, who, when, where and how* sehingga menjadi satu tulisan yang deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Selayang Pandang Gorontalo

Daerah Gorontalo terdiri dari dua daerah tingkat II yaitu Kotamadya Dati II Gorontalo dan Kabupaten Dati II Gorontalo. Daerah Gorontalo terdapat di bagian Utara pulau Sulawesi, merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara bagian Utaranya terdiri dari pulau-pulau yang disebut kepulauan Sangir Talaud (masuk wilayah Kabupaten Dati II Sangir Taulud) merupakan batas wilayah kita bagian Utara (berbatasan dengan negara Philipina bagian Timurnya terdapat laut Maluku bagian Selatan teluk Tomini (IKIP UNM).

Pada keadaan sekarang Gorontalo sudah tidak dikatakan lagi Kotamadya Dati II dan Kabupaten Dati II, sekarang sudah lebih spesifikasi ke bagian Kota dan Kabupaten Gorontalo. Gorontalo sendiri adalah pemekaran dari Sulawesi Utara jadi selayang pandang Gorontalo tidak lepas dari Sulawesi Utara yang memiliki beberapa batasan yang menghubungkan satu sama lain.

Daerah Gorontalo juga mempunyai batas-batas yang dapat menghubungkan wilayah satu dengan wilayah yang lain dengan adanya perbatasan tersebut sehingga bisa mempermudah akses jalan darat maupun laut yang menjadi salah satu *icon* Indonesia yang dikenal sebagai kepulauan maritim dan agraris.

Sebelum pada masa keemasan Gorontalo mempunyai jalan cerita sejarah yang unik untuk diulik sedikit agar mendapatkan sedikit gambaran tentang Gorontalo yang dari terkenal Gorontalo pada masa kolonial yang cakupan di dalamnya ada kata yang disebut *Limo Pohalaa* yang disebut-sebut sebagai masa kerajaan. Sehingga periorisasi yang disajikan akan sedikit demi sedikit terarah masuk ke masa pergerakan.

Kita ketahui Gorontalo adalah salah satu provinsi yang merdeka lebih dulu daripada Indonesia tetapi pada faktanya tidak luput dengan perjuangan yang mudah, harus banyak pasukkan yaitu antara lain kaum-kaum nasionalis yang peduli salah satunya adalah Nani Wartabone.

Provinsi Gorontalo terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Terbentuk

sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara berkat perjuangan dan kegigihan dari putra-putri Gorontalo dengan sasaran ingin mempercepat denyut nadi pembangunan daerah ini sehingga masyarakat yang sejahtera. Jiwa patriotisme masyarakat Gorontalo sudah tertempa semenjak masa kerajaan dimana masyarakatnya yang selalu bahu membahu ingin mempertahankan eksistensinya dari rongrongan para penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan (Fachrudin, 2017:1).

Gorontalo memiliki falsafah adati *hulo-huloa to syara'a wau syara'a hulo-hulo'a to Qur'ani* (adat Gorontalo bersandar pada syariah dan syariah bersandar pada Al-Qur'an). Falsafah ini hadir dimuka bumi Gorontalo untuk menyelamatkan, membela, dan menghidupkan keadilan dalam bentuknya yang paling kongkret. Dengan demikian falsafah itu seharusnya juga bisa membebaskan manusia dari kondisi ketidakadilan. Namun wajah falsafah khas Gorontalo ini tidak memiliki instrumen lanjut dan tidak siap pakai sehingga oprasionalisasi dari falsafah yang idealis itu kerap terbantahkan. Sebaliknya, yang sering terjadi justru benturan antara falsafah tersebut dengan faham kesetaraan (Funco, 2008:26).

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000. Luas wilayah Provinsi Gorontalo, sekitar 12.215,45 km² atau 47% dari seluruh luas wilayah Sulawesi Utara (ketika Gorontalo masih merupakan bagian dari Sulawesi Utara sebelum membentuk provinsi sendiri), secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Gorontalo antara lain:

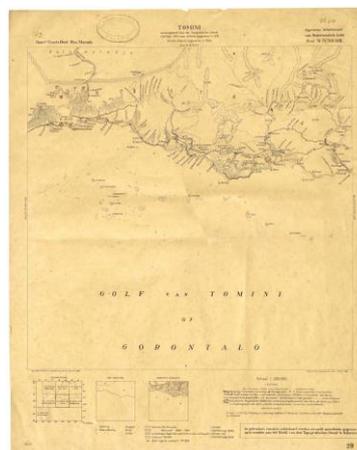
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Tengah.

Secara astronomi Provinsi Gorontalo berada pada 1°-4° LU dan 120°-124° BT. Provinsi Gorontalo mempunyai ketinggian antara 0-2.400 meter di atas permukaan laut

dan secara umum mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak biasanya terjadi pada bulan Maret, Mei, dan Oktober dengan curah hujan rata-rata 207,7 mm dan suhu rata-rata 23°C-31°C. Sedangkan tekanan udara berkisar antara 11.12,5 milibar dengan kecepatan angin rata-rata 1,9 knot.

Luas laut teritorial Provinsi Gorontalo sekitar 10.500 km² dan luas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 40.000 km² yang ada diperairan sebelah Utara. Total luas perairan yang dimiliki Provinsi Gorontalo sekitar 50.500 km². Secara geografis wilayah perairan Gorontalo berhadapan dengan perairan Pasifik, sehingga menghadap ke Korea, Jepang dan Amerika Latin.

Dari letak geografis keseluruhan luas wilayah Gorontalo yang telah tercatat pada badan pusat statistik Gorontalo adalah 12.273.00 sedangkan luas persentase keseluruhan luas wilayah Indonesia adalah 0,65. Pada jarak yang dapat menghubungkan wilayah ibukota atau biasa disebut kotamadya untuk dapat ke Kabupaten Gorontalo yang biasa disebut Dati II Gorontalo pada masa itu ialah Gorontalo-Limboto (16 km), Gorontalo-Kotamobagu (259,09 km), Gorontalo-Manado (442,81 km), Gorontalo-Tonadano melalui Manado/Tomohon (4774,61 km), Gorontalo-Tahuna melalui Manado (992,81 km), Gorontalo-Bitung melalui Manado By Pass (484,20 km).



Luas daerah Kabupaten Dati II Gorontalo 11.030 km² dan Kotamadya Dati II Gorontalo 66,15 km². Jadi luas seluruh daerah Gorontalo

11.096,15 km² atau prosen dari luas provinsi Sulawesi Utara. Daerah Gorontalo memanjang dari arah Barat ke Timur (\pm 250 km) sedangkan dari arah Selatan ke Utara sangat sempit dari Kotamadya Gorontalo di pantai Selatan sampai Kwandang di pantai Utara jaraknya \pm 65 km. Pantai Selatan pada umumnya terjal kecuali Kecamatan Paguat, Marisa dan Popayato yang terdapat dibagian Barat, sedangkan pantai Utara pada umumnya landai dan berawa-rawa (IKIP Negeri Manado).

Pegunungan yang memanjang dari Timur ke Barat dibagian pintu Selatan mempunyai pintu masuk, itulah pelabuhan Gorontalo. Pelabuhan Gorontalo ini adalah muara sungai sehingga makin hari makin bertambah dangkal akibat dari pengendapan lumpur yang dibawa oleh sungai. Sungai-sungai yang bermuara di pelabuhan Gorontalo adalah sugai Bone dan sungai Bulango (IKIP Negeri Manado).

Pelabuhan Gorontalo adalah tempat berakhirnya aliran sungai Bone dan sungai Bulango di laut yang digunakan untuk masyarakat sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dari daerah manapun. Sehingga pelabuhan Gorontalo adalah salah satu tempat transportasi jalur laut.

Kondisi Politik Orde Baru di Gorontalo

Tonggak berdirinya Orde Baru ditandai momen keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto, untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam memulihkan stabilitas pemerintahan melalui ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966. Tema-tema pokok pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto di antaranya adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta stabilitas pemerintahan dan pembangunan.

Soeharto adalah presiden RI ke-2 pada masa Orde Baru. Soeharto adalah presiden RI yang sifatnya pemegang kekuasaan yang berlebihan. Sebenarnya pada setiap 5 tahun itu diganti tetapi pada masa Orde Baru sendiri tidak adanya akan hal itu. Karena pada masa itu Soeharto pengaruh partainya sangat besar. Golkar yang selama itu berkuasa di DPR sehingga pada masa itu DPR menetapkan presiden selama 32 tahun dan bisa dikatakan

sebagai presiden seumur hidup sehingga ia bisa mencapai jabatannya itu selama 6 kali jabatan. Karena partai Golkar adalah partai besar dan pembina partai Golkar ialah Soeharto. Soeharto selama menjabat sebagai presiden yang otoriter dan sifatnya militer. Pemerintahan ini dilihat dari pembangunan baik, tetapi kekuasaannya lebih individualis (Fazrin Basamalah, 2018:81).

Berdasarkan sumber wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya sikap seorang Soeharto tidak hanya memegang kekuasaan yang berada dipusatnya saja melainkan penegasannya terasa sampai di Gorontalo yang dibuktikan melibatkan beberapa anggota negara untuk mengawasi masyarakatnya. Sikap otoriter yang melekat pada rezim ini membuat sampai bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama.

Dominasi Golkar yang sangat absolut yang berangkul kuat dengan ABRI dan birokrasi mengakar kuat tanpa ada satupun kekuatan yang dapat menandinginya sehingga mampu memenangkan pemilu sejak 1971 hingga 1997, mengakibatkan kecenderungan para ahli dalam mengkategorikan sistem kepartaian. Ada yang menyebutnya sistem satu partai, adapula yang menyebutnya sistem satu partai otoritarian, kedua pandangan ini seakan menutup mata akan adanya eksistensi partai yang lain. Dominasi Golkar yang sangat absolut yang berangkul kuat dengan ABRI dan birokrasi mengakar kuat tanpa ada satupun kekuatan yang dapat menandinginya sehingga mampu memenangkan pemilu sejak 1971 hingga 1997, mengakibatkan kecenderungan para ahli dalam mengkategorikan sistem kepartaian. Ada yang menyebutnya sistem satu partai, adapula yang menyebutnya sistem satu partai otoritarian, kedua pandangan ini seakan menutup mata akan adanya eksistensi partai yang lain (Fazrin Basamalah, 2018:81).

Posisi Golkar pengaruhnya di manapun keberadaannya masih menjadi salah satu item dari masa pemerintahan Soeharto tidak menutup kemungkinan di Gorontalo juga begitu, dikarenakan pada kursi anggota DPRD sebageian besar dikuasai oleh Golkar pada saat itu, dan menurut penuturan salah satu anggota pensiun Golkar ialah rencana Golkar rencana presiden juga. Sehingga peluang Soeharto untuk menduduki singgasana kekuasaan

kepresidenan masih panjang dan berujung di 35 tahun.

Soeharto ialah yang terpenting adalah keamanan dan banyak partai seperti masa Orde Lama. Sehingga Soeharto berusaha menjabat hanya 3 partai yaitu Golongan Karya, Persatuan Pembangunan, dan PDI. Dengan adanya 3 partai pemerintah dengan mudah mengkoordinasi pembangunan dari pada multipartai. Pembangunan tertuang dalam Repelita maka pembangunan itu berjalan khususnya di Gorontalo. Dari segi fisik pembangunan tiap satu tahun itu teratur dengan baik. Setiap lima tahun dan seterusnya sampai 32 tahun. Contoh pembangunan di Gorontalo ialah pembangunan jalan semua daerah berjalan dengan baik karena perencanaannya baik pelaksanaan serta hasilnya juga baik. Dalam bidang bidang lain juga baik.

Di Gorontalo juga merasakan hal yang sama dengan daerah-daerah lain tidak ada yang menjadi pembeda lebih menonjol hanya saja ada beberapa yang sedikit memberikan sensasi warna yang berbeda. Dari segi hanya berdirinya 3 partai dan otoriternya seorang Soeharto. Hanya saja yang menjadi pembeda disetiap daerah infrastruktur yang dibangun disetiap daerah. Contohnya pembangunan jalan untuk mempermudah akses jalan masyarakat Gorontalo, sekolah-sekolah yang menjadi wadah masyarakat Gorontalo untuk mengemban ilmu.

Pada kedua kalinya mungkin saja ia bisa beralih tidak memaksa Soekarno tetapi kenyataannya ketiga jendral pembantunya telah membuat Soekarno dalam keadaan terpaksa untuk membuat Surat Perintah tersebut yang pada hakikatnya merupakan penyerahan kekuasaan secara *de facto* (Asvi, 2007:63).

Lahirnya Orde Baru setelah tumbanganya PKI sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia. Orde Baru di Gorontalo sendiri dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, ada yang pro maupun kontra pada rezim ini. Karena setiap pemerintahan ada kelebihan ada kekurangannya. Adanya kekurangan yang masyarakat Gorontalo sendiri ialah demokrasi pada saat itu masih sangat terkekang sehingga suara-suara kebenaran masih terbungkam diam karena politik yang digunakan pada masa Orde

Baru ialah pemerintahan langsung (*direct rule*), Sistem pemilu pada saat itu hanya menganut 3 partai. Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati dipilih langsung oleh MPR, DPR, dan DPRD sehingganya suara masyarakat tidak terpakai untuk menentukan nasib negaranya sendiri.

Pada periode 1966 hingga 1980 bertebaran banyak slogan yang sarat akan propaganda Orde Baru. Isu untuk menjaga stabilitas nasional demi lancarnya pembangunan nasional, merupakan alasan banyak bertebaran slogan propaganda diberbagai media massa. Namun lebih dari sekedar stabilitas dan pembangunan nasional, pemerintah Orde Baru berusaha membentuk negara yang aman dengan masyarakat yang patuh terhadap penguasa. Singkat kata slogan propaganda yang bertebaran tersebut digunakan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang lebih kuat oleh Orde Baru (Dwi Wahyono, 2012:45).

Menurut penuturan Abdul Wahibi seorang mantan anggota partai Golkar pada masa Orde Baru, penuturan beliau mengatakan bahwa pada konsep pemerintahan ini lebih kepada sentralistik. Soeharto ialah yang terpenting adalah keamanan dan banyak partai seperti masa Orde Lama. Sehingga Soeharto berusaha menjabat hanya 3 partai yaitu Golongan Karya, Persatuan Pembangunan, dan PDI. Dengan adanya 3 partai pemerintah dengan mudah mengkoordinasi pembangunan dari pada multipartai. Pembangunan tertuang dalam Repelita maka pembangunan itu berjalan khususnya di Gorontalo. Dari segi fisik pembangunan tiap satu tahun itu teratur dengan baik. Setiap lima tahun dan seterusnya sampai 32 tahun. Contoh pembangunan di Gorontalo ialah pembangunan jalan semua daerah berjalan dengan baik karena perencanaannya baik pelaksanaan serta hasilnya juga baik. Dalam bidang bidang lain juga baik.

Politik yang dijalankan Soeharto sangat sentralistik sehingganya menjadi momok menakutkan pada masa itu mengenai hak manusia yang tidak bebas. Contoh kasus semua peraturan berdasarkan keputusan presiden yaitu pemilihan presiden yang seharusnya dipilih berdasarkan asas demokrasi ini malah diberikan doktrin deskriminasi, dengan

cara mengancam. Karena semua keputusan pada presiden sehingganya partai yang hanya 3 itu melancarkan aksinya dengan doktrin atau strategi yang mereka punya. Tetapi pada aspek lainnya pada masa ini sudah banyak membawa perubahan conntohnya ekonomi, pendidikan.

Orde Baru di Gorontalo sendiri sedikit aman terkendali pada rezim ini dikarenakan kebutuhan rakyat pada saat itu masih stabil dan masyarakat mampu mengatasi kebutuhan hidupnya. Bahan-bahan sembako masih terjangkau murah. Penghasilan masyarakat Gorontalo perputaran ekonominya hanya sebgaiian kecil dari perputaran ekonomi diseluruh Indonesia, bahwasannya penghasilan masyarakat hanya dari pajak daerah dan bantuan pemerintah pusat. Contohnya pembangunan pabrik gula di Lakea, pembangunan pasar Sentral Limboto oleh Marten Liputo tahun 1989 sehingganya masyarakat masih bisa bernafas panjang.

D. SIMPULAN

Pemerintahan Orde Baru ini adalah pemerintahan terlama dibandingkan dengan masa jabatan presiden Indonesia yang lainnya. Yang mempunyai ciri khas tersendiri yang lebih menonjol pada politik ini yaitu sentralistik dan otoriter. Program yang dijalankan pada masa orde baru ini dilaksanakan dengan skala prioritas, di antaranya: (1) Pengendalian inflasi; (2) Pencukupan kebutuhan pangan; (3) Rehabilitasi prasarana ekonomi; (4) Peningkatan ekspor; dan (5) Pencukupan kebutuhan sandang. Kondisi politik yang dijalankan Soeharto disama ratakan diseluruh penjuru Nusantara. Pemerintahan ini memberikan suatu perubahan untuk masyarakat Gorontalo khususnya pada bidang ekonomi, pendidikan, budaya dan sosial. Rezim ini yang dikatakan sebagai penerapan sistem langsung yang cukup lama penerapannya, kira-kira 32 tahun di Bumi Hulondalo mengingat presiden itu lebih menitik beratkan sistem politik sentralisasi atau penerapan langsung satu arah. Sehingganya sistem pemerintah itu lebih menitikberatkan kemandirian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asvi, Warman Adam. 2007. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Dwi Wahyono dan Hadi Gayung Kasuma. "Propaganda Orde Baru 1966-1980". Dalam *Verleden*. Volume 1, Nomor 1 Desember 2012. (1-109).
- Fachrudin, Zain Olilingo. 2017. *Potensi Investasi di Provinsi Gorontalo*. Yogyakarta: Deepublish, CV Budi Utama.
- Fazrin Basamalah dan Lex Admnistratum. "Pengaruh Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan (Presidensial) Menurut Pasal 6A UUD 1945". Volume VI, Nomor 2, Apr-Jun 2018.
- Funco, Tanipu. 2008. *Raut Muka Gorontalo Kita*. Yogyakarta.
- Joni Apriyanto. 2012. *Sejarah Gorontalo Modern dari Hegemoni Kolonial ke Provinsi*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan. "Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah". Dalam *Jurnal of Government-JOG*. Volume 4 Nomor 1 Juli-Desember 2018.
- Sivafian, Hendra Legowo dkk. "Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996". Dalam *Publika Budaya*. Volume 1, Nomor 1, November 2013.
- Yayasan 23 Januari 1942 bekerjasama dengan IKIP Negeri Manado Cabang Gorontalo. *Perjuangan Rakyat di Daerah Gorontalo-Menentang Kolonialisme Mempertahankan Negara Proklamasi*.

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL KALPATARU

1. Naskah berbahasa Indonesia yang disempurnakan bertemakan kesejarah yang meliputi hasil penelitian sejarah, pengajaran sejarah dan penelitian kebudayaan.
2. Naskah harus asli dan belum pernah dimuat dalam media lain. Naskah dapat berupa hasil penelitian/artikel kajian konseptual yang ditulis oleh perorangan dan atau kelompok.
3. Naskah ditulis dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan penulisan artikel ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, berupa ketikan, beserta soft file dalam CD-RW atau dengan mengirimkan email pada redaksi jurnal Kalpataru dengan alamat jurnalkalpatarusejarah@gmail.com, spasi tunggal, jenis huruf arial narrow ukuran 12, dengan panjang naskah antara 8-15 halaman pada kertas A4.
4. Artikel hasil penelitian memuat:
 - JUDUL** : **XXX (HURUF KAPITAL)**
 - Nama Penulis** : **(disertai jabatan, institusi, dan email)**
 - Abstrak** : (Bahasa Indonesia yang memuat 100-200 kata diikuti kata kunci, dengan jenis huruf arial narrow dan ukuran huruf 11 serta dicetak miring).
 - A. PENDAHULUAN** : (memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara ringkas, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
 - B. METODE PENELITIAN**
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**
 - D. SIMPULAN** : (berisi simpulan).
 - DAFTAR PUSTAKA** : (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian naskah).
5. Artikel Kajian Konseptual memuat:
 - JUDUL** : **XXX (HURUF KAPITAL)**
 - Nama Penulis** : **(disertai jabatan, institusi, dan email)**
 - Abstrak** : (Bahasa Indonesia yang memuat 100-200 kata diikuti kata kunci, dengan jenis huruf arial narrow dan ukuran huruf 11 serta dicetak miring).
 - PENDAHULUAN** : (memuat latar belakang masalah, tinjauan pustaka secara ringkas, masalah penelitian, dan tujuan penelitian).
 - Sub Judul** : Sesuai dengan kebutuhan (tanpa numbering).
 - Simpulan** : (berisi simpulan dan saran).
 - DAFTAR PUSTAKA**
6. Referensi sumber dalam teks artikel ditulis dengan menggunakan side note, contoh (Jalaludin, 1991:79); sementara penulisan daftar pustaka disusun dengan ketentuan. Nama pengarang. Tahun terbit. Judul (dicetak miring). Kota terbit: Nama Penerbit. Contoh: Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Daftar pustaka hanya memuat pustaka/sumber yang dirujuk dalam uraian dan disusun menurut abjad tanpa nomor urut.
7. Naskah yang dimuat akan disunting kembali oleh redaksi tanpa mengubah isinya.
8. Naskah yang ditolak (tidak bisa dimuat) akan dikirim kembali ke penulis dengan pemberitahuan tertulis dari redaksi atau melalui email.
9. Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapat 1 (satu) majalah nomor yang bersangkutan.
10. Kontak person: Muhamad Idris (081271498618); Eva Dina Chairunisa (082281267851); Jeki Sepriady (085269261780).